

Membangun Perdamaian Relasional di Poso: Sebuah Kontribusi Pendidikan Perdamaian di Sekolah Perempuan terhadap Perdamaian di Poso

Yuliana Tien B. Tacoh

Article submitted
2021-02-16

Mianto Nugroho Agung
Editor decision submitted
2020-12-21

Abstraksi

Tulisan ini hendak menjelaskan perdamaian dengan pendekatan relasional yang merupakan bagian dari proses pembangunan perdamaian. Pembangunan perdamaian dengan pendekatan tersebut adalah proses rekonsiliasi dan pencegahan konflik yang dibutuhkan di Kabupaten Poso sebagai daerah pasca konflik. Selanjutnya tulisan ini juga menyoroti bagaimana pembangunan perdamaian relasional dapat terbangun melalui kontribusi dari kegiatan pendidikan perdamaian di Sekolah Perempuan di Poso. Pelaksanaan kegiatan pendidikan perdamaian yang akan dikaji adalah tujuan pendidikan perdamaian, interaksi antara sesama peserta sekolah perempuan, dan materi serta metode yang dapat menunjang dan berperan dalam pembangunan perdamaian relasional di Kabupaten Poso. Penulisan makalah ini memakai metode penelusuran literatur. Hasilnya memperlihatkan bahwa pendidikan perdamaian yang dilaksanakan di Sekolah Perempuan Kabupaten Poso dapat memberi kontribusi yang sesuai untuk pembangunan perdamaian relasional. Kontribusi pendidikan perdamaian pada pembangunan perdamaian relasional terlihat pada kajian tujuan pendidikan perdamaian, interaksi antara sesama peserta sekolah perempuan, dan materi serta metode yang dipakai dalam pelaksanaan pendidikan perdamaian di sekolah perempuan.

Abstract

This paper wants to explain peace with a relational approach which is part of the peace building process. Peace building with this approach is a process of reconciliation and conflict prevention that is needed in Poso Regency as a post-conflict area. Furthermore, this paper also highlights how relational peace building can be built through contributions from peace education activities at the Women's School in Poso. The implementation of peace education activities that will be studied are the objectives of peace education, interaction between fellow female school participants, and materials and methods that can support and play a role in the development of relational peace in Poso Regency. The writing of this paper uses the literature search method. The results show that the Peace Education conducted at the Poso District Women's School can make an appropriate contribution to the development of relational peace. The contribution of peace education to relational peace building can be seen in the study of the objectives of peace education, the interaction between fellow female school participants, and the materials and methods used in the implementation of peace education in women's schools.

Keywords: *Peacebuilding, Relational Peace, Peace Education*

Pendahuluan

Pembangunan perdamaian di daerah pasca konflik umumnya menghadapi tantangan, baik dari kondisi masyarakat itu sendiri maupun dari pendekatan yang dilakukan oleh negara. Seperti yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah yang pernah mengalami konflik komunal antara tahun 1998 – 2001, kemudian terjadi aksi kekerasan secara sporadis yang merupakan imbas atau perluasan dari konflik tersebut sampai pada tahun 2007. Menurut hasil penelitian yang berjudul “Kegagalan Rekonsiliasi Masyarakat Poso pasca Konflik Komunal”, bahwa setelah satu dekade lebih Perjanjian Malino untuk Poso, kedamaian sejati dari tragedi masa lampau belum dirasakan oleh masyarakat. Ada dua faktor penyebab kegagalan tersebut, yaitu keterikatan masyarakat pada kondisi emosional konflik masa lalu dan kekuatiran masyarakat pada kondisi sosial masa kini yang tidak kondusif bagi pembangunan perdamaian yang sejati (Nutfa,dkk, 2016 :168-174). Pada kajiannya juga tentang daerah pasca konflik, Nutfa (2015 : 133-142) mengatakan bahwa kegagalan rekonsiliasi membuat terbentuknya masyarakat yang tidak memiliki pegangan dalam relasi sosial dan mengubah pola interaksi sosial. Sehingga bisa membuat masyarakat kehilangan rasa saling percaya, dan mendorong terbentuknya ciri individualistik

dalam perilaku masyarakat tersebut. Hasil penelitian yang berjudul “Social Trust of Indonesia's Post Conflict Society :A Case Study of Poso Regency”, pun memaparkan bahwa kondisi kondisi masyarakat Poso dalam keadaan melemahnya rasa saling percaya antara satu dengan yang lain, Pulubuhu, dkk (2019 : 1-9). Jika masyarakat ada dalam kondisi relasi personal atau antar komunitas yang tidak sehat maka akan sulit untuk membangun perdamaian yang hakiki.

Tahapan yang harus dihadapi oleh masyarakat di daerah yang pernah mengalami konflik komunal adalah periode rekonsiliasi pasca konflik. Upaya - upaya ini dilakukan untuk mewujudkan perdamaian di daerah tersebut. Walaupun usaha ini masih menemukan berbagai tantangan karena kondisi masyarakat yang masih rentan dan rawan konflik. Seperti situasi di Poso sebagai daerah pasca konflik, memperlihatkan bahwa Poso pada umumnya memang telah berada dalam kondisi aman tetapi keadaan damainya masih sangat rentan (*peace vulnerabilities*) sehingga mudah sekali untuk dikembalikan pada situasi konflik. Hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan antara tujuan perdamaian ideal yang diharapkan dengan kondisi objektif masyarakat terkini yang masih terus dihinggapi oleh rasa curiga antar komunitas. Selain itu, pembangunan perdamaian yang melibatkan seluruh lapisan fungsional dan kelompok kategorial masyarakat belum terinisiasi dan terintegrasi dengan baik (Manna dan Syafiie, 2014 : 225-256 ; Nutfa, dkk, 2016 : 168-174; Pulubuhu, dkk, 2019 : 1-9). Konflik komunal memang meninggalkan sejumlah persoalan, yaitu retaknya hubungan kekerabatan dan kekeluargaan, lunturnya kepercayaan serta memudarnya ikatan primordial (Nutfa, 2015 : 133-142).

Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk penanganan konflik dan membangun perdamaian Indonesia adalah bentuk penegakkan hukum, penanganan pengungsi dan upaya untuk keamanan wilayah Poso dengan menggelar berbagai pendekatan operasi militer (McRae, 2013 : 157-187; Yakobus, 2019:01-09). Ini yang disebut sebagai penanganan konflik melalui menjaga perdamaian (Galtung, 1969 :167-191). Sedangkan upaya menciptakan perdamaian saat konflik berlangsung melalui upaya perjanjian damai yang disebut deklarasi Malino 1. Selain itu juga pemerintah bersama dengan segenap elemen masyarakat sipil terus berupaya melakukan proses rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian di Poso dengan mencairkan hubungan-hubungan sosial antar komunitas yang pernah bertikai. Hal ini telah menjadi visi pemerintah daerah Kabupaten Poso sejak konflik horisontal agar kekerasan masa berbau Sara dapat diakhiri. Visi tersebut adalah terwujudnya Kabupaten Poso yang damai, adil, sejahtera yang didukung oleh sumber daya manusia yang andal dan bermartabat. Sejalan dengan itu upaya swadaya dari masyarakat untuk proses rekonsiliasi dan perdamaian juga dilakukan, diantaranya adalah pertemuan langsung masyarakat, upaya dan bantuan Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga agama dan upaya menggali kearifan lokal masyarakat Poso secara khusus mengacu pada budaya suku Pamona Poso (Lempadely, Ruagadi dalam Amirachman, 2007 : 202-266; Rozi, dkk 2006; Wijaya 2020 : 58-63).

Namun, hasil penelitian Manna, Syafiie (2014 : 225 -256) mengatakan bahwa upaya dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mencegah konflik dan mengupayakan rekonsiliasi masih bersifat pendekatan “menyelesaikan yang terjadi di permukaan” dan belum membuat kerangka pencegahan secara terpadu, yang

melibatkan masyarakat dari “akar rumput”. Pemerintah mengatasi konflik apabila terjadi kejadian pelanggaran hukum atau tindak pidana yang masih menjadi tindakan bawaan sakit hati dan balas dendam dengan pendekatan penegakan hukum. Tetapi belum menampakkan langkah yang strategis untuk penanggulangan konflik dan aksi radikalisme. Pemerintah daerah disebutkan terlalu fokus pada pembangunan fisik tetapi masih belum menyentuh pembangunan non fisik. Alokasi anggaran untuk pembangunan fisik masih lebih besar daripada alokasi anggaran untuk non fisik. Masyarakat sebenarnya mengalami rasa sakit pada non fisik karena rasa trauma, kehilangan, dendam dan lain sebagainya. Ini dibuktikan dengan situasi di Poso bahwa masih ada kekhawatiran dengan rasa aman terhadap masyarakat karena secara substansi kebijakan pemerintah daerah belum dapat mencegah ancaman terhadap masyarakat Poso. Tolak ukurnya masih adanya teror, masih munculnya persepsi *gap-gap* antar kelompok belum adanya rasa persatuan, yang dilihat saat ini hanya terjadi pada permukaan (Manna, Syafiie, 2014 : 225-256). Pemaparan ini memperlihatkan relasi masyarakat yang belum terbangun dengan natural dan sehat. Semua hubungan komunikasi untuk kehidupan damai masih bersifat menjaga ketertiban saja dan bukan menjalin hubungan harmonis yang natural.

Idealnya sebuah rekonsiliasi masyarakat pasca konflik adalah harus dapat mencegah dan menghentikan kekerasan. Namun melihat bahwa berbagai upaya rekonsiliasi konflik yang telah dilakukan selama ini adalah cenderung bersifat *top-down*, dengan sarana yang minim dan kebijakan yang belum sistematis, upaya ini dianggap belum sepenuhnya menyentuh akar konflik serta dampak sosial pasca konflik. Kecenderungan rekonsiliasi konflik yang masih *top-down* membawa masyarakat pada posisi sebagai objek tanpa mampu membangun kesadaran rekonsiliasi yang bersumber dari potensi masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang masih memiliki rasa curiga dan trauma terhadap konflik masa lalu akan sulit untuk berkontribusi pada proses perdamaian (Jarstad, 2019 : 1-5). Rekonsiliasi sejatinya adalah kolaborasi pembangunan perdamaian antara pemegang kebijakan dan masyarakat sebagai subjek sehingga memunculkan sinergitas pembangunan perdamaian yang berkelanjutan, rekonsiliasi merupakan proses jangka panjang untuk mengatasi permusuhan dan rasa saling tidak percaya diantara dua kelompok yang berkonflik (Nutfa, 2015 : 133-142).

Jika melihat upaya pendekatan pembangunan perdamaian yang dilakukan di Poso masih sebatas “menyelesaikan di permukaan” (Manna dan Syafiie, 2014 : 225 - 256), dan belum menyentuh kondisi kemanusiaan korban konflik yang mengalami masalah trauma, rasa kehilangan, dendam, maka sulit dikatakan bahwa pembangunan perdamaian sebagai situasi perdamaian yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Poso telah terjadi di sana. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Poso masih sangat rentan dengan konflik dan perpecahan. Adanya kesenjangan antara tujuan perdamaian ideal dan kondisi objektif masyarakat yang masih rentan dengan potensi konflik, sehingga proses perdamaian di Poso belum dapat terlaksana dengan baik. Sebagai daerah pasca konflik Poso membutuhkan sebuah pendekatan perdamaian yang berkelanjutan bukan lagi hanya sampai pada penjaga perdamaian atau menghentikan konflik dan kekerasan. Upaya penataan kembali tatanan sosial pasca konflik yaitu dengan mendorong proses perdamaian berkelanjutan dan

menentukan pendekatan peka konflik berbasis perdamaian (Triyono, 2009, : 48-70). Upaya perdamaian berkelanjutan ini sering disebut pembangunan perdamaian mengacu pada salah satu dari tiga konsep pendekatan terhadap perdamaian yang dikemukakan oleh Galtung (1976 :297). Ia membangun tiga pendekatan terhadap perdamaian yaitu “menjaga perdamaian”, “menciptakan perdamaian” dan “membangun perdamaian”. Membangun perdamaian di Poso termasuk penanganan masalah struktural dan hubungan jangka panjang antara para pihak yang berkonflik belum tersentuh secara berkualitas. Hubungan jangka panjang antara pihak yang berkonflik adalah salah satu syarat dari terlaksananya pembangunan perdamaian.

Upaya pembangunan perdamaian dengan maksud membangun hubungan atau relasi jangka panjang di antara masyarakat, salah satunya dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan untuk pembangunan perdamaian dapat berkontribusi pada pembangunan perdamaian melalui transformasi pasca-konflik (Unicef, 2011 :7-22). Pendidikan adalah alat yang paling penting untuk pembangunan manusia dan berkontribusi untuk transformasi dalam masyarakat. Ini adalah sarana di mana generasi berturut-turut mengembangkan nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan untuk kesehatan dan keselamatan pribadi mereka dan untuk pengembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya di masa depan. Dalam hal untuk pembangunan perdamaian, pendidikan adalah kegiatan atau proses untuk menanamkan pemahaman akan pentingnya perdamaian secara berkelanjutan, sehingga diharapkan terbentuk perilaku damai dan akhirnya budaya perdamaian dari mereka yang terlibat didalamnya. Menjawab kebutuhan ini, AMAN sebagai Lembaga lintas iman berinisiatif membangun Sekolah Perempuan Perdamaian di Poso dengan maksud untuk memberdayakan perempuan dari situasinya sebagai korban konflik menjadi agen perdamaian melalui kegiatan pendidikan.

Keterlibatan Perempuan dalam perdamaian sudah sering dibahas, bahwa mereka memakai pendekatan “relasi” atau “hubungan” untuk mencegah perluasan kekerasan (Sorensen, 1998 : 3-17; Almagro,2018 :1-16; Adjei,2019 :1-20). Studi sebelumnya juga memperlihatkan bahwa betapa pentingnya melibatkan perempuan dalam pembangunan perdamaian karena melihat keberhasilan perempuan dalam penanganan konflik dan rekonsiliasi (Shulika, 2018 :113-162). Sherwood (2016 :1-11) menjelaskan bahwa ada konsep baru tentang pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian yang menekankan peran bagi perempuan dan masyarakat sipil serta kemitraan di antara mereka dengan pemerintah, organisasi internasional / non-pemerintah untuk menghasilkan kapasitas yang lebih berlapis dan komprehensif. Dalam konteks negara berkembang di mana konflik adalah ancaman, secara tradisional perempuan dalam konteks ini memberikan kontribusi terbesar mereka terhadap isu-isu struktural yang mencegah munculnya konflik. Tetapi kemudian mereka semakin terlibat dalam aspek operasional pencegahan konflik di bidang-bidang seperti peringatan dini dan de-eskalasi. Perempuan perkotaan dan pedesaan berkontribusi berbeda. Oleh karena itu, perempuan memainkan peran yang beragam tergantung pada konteks tingkat negara mereka, kedudukan sosial-ekonomi, tingkat pendidikan dan hak hukum dan budaya mengenai partisipasi (Sherwood,2016 :1-11).

Beberapa studi berikut ini telah memperlihatkan bahwa sekalipun upaya

perdamaian di Poso yang dipayakan pemerintah masih bersifat *topdown*, tetapi gerakan dari “akar rumput” untuk membina perdamaian di Poso ternyata sudah dilakukan dan oleh perempuan. Studi oleh Tacoh (2017 :197-220) fokus pada rekonsiliasi, dan pembangunan perdamaian pasca konflik yang memaparkan suatu kegiatan terstruktur lewat Sekolah Perempuan perdamaian di Kabupaten Poso dan menerapkan pendidikan perdamaian untuk upaya resolusi konflik dan pembangunan perdamaian. Kemudian Purnasanti (2018 :9-21) mengkaji peran Search for Common Ground dalam menangani kejahatan kemanusiaan bagi perempuan dan anak korban Konflik Poso. Kajian tersebut fokus kepada bagaimana peran SFCG dalam membangun perdamaian bagi perempuan dan anak di Poso. Hasil studi ini memaparkan bahwa peran SFCG signifikan dalam mewujudkan pembangunan perdamaian bagi perempuan dan anak. Penelitian Kristimanta (2018 :1-15) juga fokus pada pembangunan perdamaian secara khusus dari peserta Sekolah Perempuan Mosintuwu sebagai gerakan “akar rumput”. Demikian juga penelitian dari Indriani (2018 :46-55) dengan subyek yang sama dari tulisan ini yaitu Sekolah Perempuan perdamaian di Poso dan fokus pada pemberdayaan perempuan. Temuan studi ini memperlihatkan bahwa pendidikan perdamaian yang diterapkan secara kreatif di sekolah perempuan, memberi manfaat positif bagi pemberdayaan perempuan.

Hasil studi yang telah disebutkan sebelumnya memperlihatkan bahwa upaya pembangunan perdamaian di Poso sudah dan masih terus dilakukan oleh sebagian masyarakat sipil atau aktor non negara. Itu berarti belum ada sinergitas dalam pembangunan perdamaian yang diprogramkan negara dengan masyarakat sipil. Padahal jika masyarakat bisa berkontribusi pada perdamaian dengan upaya mandiri, dan upaya tersebut juga didukung dan menjadi program pemerintah, ini akan menjadi sebuah pembangunan perdamaian berkelanjutan yang komprehensif. Pembangunan perdamaian yang efektif dan berkelanjutan membuat masyarakat pasca konflik menjadi berdaya untuk mencegah dan menghentikan kekerasan (Sempiga, 2017 :185-200). Jika perdamaian diupayakan oleh masyarakat secara mandiri, maka hal itu dapat menjadi proses yang permanen, karena masyarakat mengusahakan sendiri kebutuhannya (Nutfa, 2015 :133-142), dan memfungsikan kembali pranata sosial yang tidak berdaya saat konflik (Sukendar, 2011 :271-286).

Berkaitan dengan hubungan jangka panjang antara pihak yang berkonflik, Jarstad dkk (2019, :5-16) melalui studinya membangun tiga pendekatan terhadap perdamaian namun saling terkait yang disebut dengan pendekatan perdamaian situasional, perdamaian relasional dan perdamaian ide. Mereka mengatakan bahwa dengan tiga pendekatan ini dapat membantu menggerakkan bidang perdamaian ini ke depan dan memungkinkan analisis varietas perdamaian yang lebih komprehensif di seluruh kasus secara sistematis, namun dengan cara yang beragam. Tulisan ini hanya akan membahas perdamaian relasional. Pendekatan relasional seperti yang ditawarkan Jarstad, dkk (2019 :5-16) terhadap pembangunan perdamaian diharapkan dapat lebih mendekati pengertian perdamaian ideal yang dapat terwujud pada masyarakat pasca konflik. Sebab konsep perdamaian relasional menyarankan cara - cara hubungan antar aktor secara ketat dan sistematis namun juga tidak terbebani dengan konsep yang banyak. Kajian lebih difokuskan bagaimana pendekatan pendidikan perdamaian di sekolah perempuan dapat memberdayakan

perempuan, sehingga berpeluang untuk mejadi sebuah kontribusi penting pada pembangunan perdamaian di Poso secara khusus perdamaian relasional. Konsep perdamaian rasional ini akan menjadi pijakan untuk memotret atau mengkaji model pendidikan perdamaian “Ramah Perempuan” di Sekolah Perempuan Perdamaian (Tacoh, 2017 :197-220). Pendekatan perdamaian relasional sebagai upaya pembangunan perdamaian diharapkan bisa menyentuh masalah non fisik dari korban konflik, seperti rasa curiga, trauma dan dendam sebagaimana yang disebutkan oleh Manna dan Syafii (2014 : 225-256). Salah satu upaya pembangunan perdamaian yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat adalah pendidikan perdamaian (Tacoh,2017 :197-220). Konsep pendidikan perdamaian di Sekolah Perempuan yang akan dikaji dibatasi pada: tujuan pendidikan perdamaian, interaksi di antara peserta sekolah perempuan, dan pokok bahasan serta metode yang di pakai.

Tinjauan Pustaka

Pembangunan Perdamaian

Untuk memahami apa itu perdamaian memang ada beberapa pendekatan. Perdamaian menurut gagasan lama yaitu sebagai sinonim untuk stabilitas atau keseimbangan. Konsepsi perdamaian ini juga mengacu pada keadaan internal manusia, orang yang damai dengan dirinya sendiri. Ini juga mencakup konsep "hukum dan ketertiban", dengan kata lain gagasan tentang ketertiban sosial yang dapat diprediksi (Galtung, 1969 : 167-191). Kemudian Galtung lebih spesifik pada pengertian perdamaian negatif dan positif. Gagasan perdamaian sebagai tidak adanya kekerasan kolektif terorganisir, dengan kata lain kekerasan antara kelompok manusia utama; terutama bangsa-bangsa, tetapi juga antara kelas dan antara kelompok ras dan etnis karena besarnya perang internal dapat terjadi. Jenis perdamaian ini disebut sebagai perdamaian negatif. Kemudian ada konsep perdamaian sebagai sinonim untuk semua hal baik lainnya di komunitas dunia, terutama kerja sama dan integrasi antara kelompok manusia, dengan kurang menekankan pada tidak adanya kekerasan. Ini disebut sebagai perdamaian positif. Dapat dikatakan bahwa pengertian dari Galtung ini adalah perdamaian negatif ditandai dengan tidak adanya kekerasan langsung, dan perdamaian positif ditandai dengan mengatasi kekerasan struktural dan budaya juga (Sempiga, 2017 : 185-200).

Secara kritis Soderstorm, Jarstad, dkk (2020 :3-5) melihat bagaimana pengertian perdamaian Galtung cukup sulit untuk menangkap perkembangan empiris di sebagian besar masyarakat pasca-perang. Karena itu mereka mengembangkan lagi pengertian perdamaian melalui studi mereka dengan mengatakan bahwa ada banyak cara orang mendefinisikan perdamaian. Mereka memetakan dalam tiga bentuk upaya beberapa ahli dalam mengkonseptualisasikan dan mengoperasionalkan perdamaian. *Pertama*, ada yang membangun pengertian dengan memulai dari hubungan sebab akibat antara perdamaian dan sesuatu yang lain, sehingga secara implisit atau eksplisit menguraikan apa yang perlu ada agar perdamaian ada (Jarstad, 2019 :5-16). Misalnya mulai dengan mempertanyakan tentang mekanisme demokrasi, kapitalisme atau liberalisme mengarah pada perdamaian. *Kedua*, ada beberapa konsep yang bertujuan untuk mendefinisikan berbagai jenis perdamaian ideal yang berfokus pada karakter atau kualitas

perdamaian. Sebagian besar mengambil titik awal mereka dalam definisi Galtung tentang perdamaian negatif dan positif, yang berarti tidak adanya kekerasan langsung atau tidak adanya kekerasan struktural dan bertujuan untuk lebih menentukan apa arti "perdamaian yang baik" atau "kurang baik" (Galtung, 1996, :9-23). Misalnya menyebutkan sebagai "perdamaian bersyarat", "perdamaian genting", hanya perdamaian, dan masih banyak lagi. Sebagian besar konseptualisasi ini dapat diurutkan sebagai variasi positif atau variasi konseptualisasi perdamaian negatif (Jarstad, 2019 :5-16). *Ketiga*, para peneliti telah mencoba untuk mengkonsepkan kembali perdamaian dalam upaya untuk mengkritisi gagasan pembangunan perdamaian liberal dengan memasukkan aspek lokal dan keragaman budaya dalam studi perdamaian pasca-perang. Terutama, konsep perdamaian hibrida diperkenalkan, atau penempatan dua objek secara berdampingan, yaitu perdamaian internasional dan perdamaian lokal. Konseptualisasi ini menunjuk pada kebutuhan untuk memperluas pemahaman perdamaian sebagai sesuatu yang kompleks, budaya, dan tergantung konteks. Studi dari Jarstad (2019 :5-16) dan timnya ini sebenarnya memperlihatkan bahwa, berangkat dari pengertian perdamaian menurut Galtung telah terjadi pengembangan dan pembangunan definisi perdamaian yang dikonsepsikan sesuai situasi dan keadaan dimana upaya perdamaian dibangun. Hal ini juga sesuai dengan yang maksudkan oleh Galtung (1969 :167-191) bahwa pengertian kekerasan bisa berbeda maka upaya untuk mengatasi kekerasan atau melakukan proses perdamaian adalah sesuai konteksnya.

Galtung (1976 : 282-303) membangun tiga pendekatan terhadap perdamaian yaitu menjaga perdamaian, menciptakan perdamaian dan membangun perdamaian. Pendekatan itu untuk membedakan setiap indikator operasional dari tiga ranah tersebut. Menjaga perdamaian ada pada tiga poin skala eskalasi: untuk menahan kekerasan dan mencegahnya meningkat menjadi perang; untuk membatasi intensitas, penyebaran geografis, dan durasi perang setelah pecah; dan untuk mengkonsolidasikan gencatan senjata dan menciptakan ruang untuk rekonstruksi setelah perang berakhir. Selanjutnya adalah menciptakan perdamaian. Menurut Galtung (1996 :9-23) menciptakan perdamaian adalah bergerak menuju penyelesaian konflik bersenjata, di mana pihak-pihak yang berkonflik didorong untuk mencapai kesepakatan secara sukarela. Mediasi dan intervensi pihak ketiga adalah bagian kunci dari penciptaan perdamaian. Mediasi telah menjadi bidang yang semakin ramai, dengan organisasi pemerintah, dan organisasi non-pemerintah semuanya bisa terlibat (Sempiga, 2017 :185-200). Pendekatan yang ketiga adalah pembangunan perdamaian. Menurut Galtung (1996 :9-23) pembangunan perdamaian adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik dan ekonomi demi perdamaian abadi (Galtung, 1996 :9-23; Purnasanti, 2018 :9-21).

Pembangunan perdamaian melibatkan penanganan dan penghapusan akar penyebab kekerasan struktural dan kekerasan budaya yang memungkinkan kekerasan langsung. Tujuan dari pembangunan perdamaian adalah perdamaian yang positif dan berkelanjutan. Menurut Galtung (1976 :297) struktur harus ditemukan yang menghilangkan penyebab perang dan menawarkan alternatif untuk perang dalam situasi di mana perang mungkin terjadi. Galtung juga menekankan pentingnya pengetahuan lokal, kepemilikan dan partisipasi dalam pembangunan perdamaian.

Pembangunan perdamaian mendasari pekerjaan perdamaian dan pemeliharaan perdamaian dengan menangani masalah struktural dan hubungan jangka panjang antara para pihak yang berkonflik. Pembangunan perdamaian, antara lain, terdiri dari rekonstruksi pasca konflik horisontal (perang). Pembangunan perdamaian mencakup pemeliharaan perdamaian dan bertujuan mencegah terjadinya kekerasan kembali, ini mencakup langkah-langkah seperti kompromi. Tujuan jangka pendek untuk mencegah kekerasan ini sering kali bertentangan, dan dapat mempengaruhi tujuan jangka panjang untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan. Maksudnya adalah rekonstruksi pasca konflik sebagai bagian dari pembangunan perdamaian terdiri dari tugas-tugas negatif untuk mengakhiri kekerasan yang berkelanjutan dan mencegah kambuhnya perang, di satu sisi, dan tugas positif untuk membangun perdamaian yang mandiri, di sisi lain (Sempiga, 2017 : 185-200). Pembangunan perdamaian mungkin tidak dapat berfungsi tanpa dukungan penjaga perdamaian, penjaga perdamaian tidak dapat keluar tanpa pekerjaan pembangunan perdamaian. Dengan kata lain, tugas negatif dan positif saling bergantung satu sama lain. Namun perlu juga ada alternatif atau langkah khusus untuk pembangunan perdamaian yang berbeda, selain daripada mengakhiri kekerasan dengan perjanjian damai atau diterjunkan pihak kepolisian atau militer untuk penjaga keamanan.

Konsep pembangunan perdamaian semakin berkembang dan bergeser ke arah lebih kontemporer. Selama ini yang sering dipakai untuk menerapkan pembangunan perdamaian di daerah pasca konflik adalah pembangunan perdamaian liberal. Pendekatan pembangunan perdamaian liberal adalah demokratisasi, hak asasi manusia, perangkat hukum, dan sistem pasar bebas/liberal yang sejatinya bertujuan membawa keamanan dan perdamaian bagi daerah yang pernah dilanda konflik, namun di beberapa negara upaya melembagakan pendekatan ini justru gagal menciptakan perdamaian yang berkelanjutan dan menyeluruh (Anam, 2018 :37-48). Pembangunan perdamaian liberal kemudian perlahan mulai ditinggalkan, ada yang menawarkan konsep pembangunan perdamaian dengan pendekatan “hybrid”, yaitu pendekatan yang menolak dominasi paradigma liberal melalui bentuk akomodasi dan apresiasi terhadap apa yang disebut “lokal”, sehingga dapat menciptakan ruang interaksi bersama antara yang lokal dan liberal dalam bentuk pendekatan pembangunan perdamaian hibrida (Anam, 2018 :37-48; Chadwick.dkk, 2013 :1-56; Morgan, 2018 :352-366). Tetapi studi dari Morgan (2018 :352-366) dan Almagro (2018 :1-16) menawarkan lebih dari sekedar perdamaian hibrida, namun bagaimana perdamaian yang menekankan relasi antara aktor pembangun perdamaian, perdamaian relasi antara penerima manfaat program dan lembaga donor, serta relasi dalam masyarakat pasca konflik.

Relasi atau hubungan rupanya menjadi acuan untuk pembangunan perdamaian yang lebih manusiawi. Perdamaian relasional yang merupakan suatu pendekatan perdamaian langsung melibatkan hubungan antar aktor menjadi salah satu alternatif untuk terciptanya kondisi damai jangka panjang di daerah pasca konflik seperti Kabupaten Poso. Pentingnya membangun perdamaian relasional karena indikatornya berkaitan dengan kohesi sosial atau hubungan (Soderstroom, 2020 :3-7).

Perdamaian Relasional

Pada saat akan membahas apa yang dimaksud dengan perdamaian sebagai konsep relasional, pertama-tama harus memiliki kejelasan apa itu aspek relasional. Apa yang dimaksud dengan hubungan? Pemaparan berikut ini menjelaskan arti hubungan yang dikaitkan dengan perdamaian relasi oleh Soderstrom, Jarstad (2020 :5-6). Hubungan adalah adanya dua atau lebih entitas yang berasosiasi satu dengan yang lain. Pada dasarnya sebuah hubungan melibatkan dua aktor (diad), tetapi aktor-aktor ini dapat berupa kelompok individu atau entitas yang lebih besar seperti komunitas, atau seluruh negara. Hubungan tidak perlu menjadi simetris, yaitu, dua aktor yang terlibat tidak perlu berukuran sama atau memiliki kekuatan serupa. Suatu hubungan hanya terwujud ketika aktor yang terlibat memiliki beberapa yang mempengaruhi satu sama lain; jika kedua aktor benar-benar independen dan tidak terpengaruh oleh yang lain, mereka tidak memiliki hubungan. Suatu hubungan dapat dibatasi waktu, dan mungkin memiliki sedikit konsekuensi di luar saat itu, tetapi juga dapat diperpanjang dalam waktu dan memiliki dampak besar pada pihak-pihak yang terlibat. Hubungan tersebut terdiri dari interaksi perilaku antara pihak-pihak yang terlibat, serta pengalaman subjektif mereka terhadap orang lain (sikap, keyakinan, dan opini), dan pemahaman mereka tentang hubungan secara keseluruhan. Menurut Soderstroom, Jarstad, (2020 :7-19) hubungan secara analitis dapat dipecah menjadi tiga komponen ini, interaksi berulang, pertukaran, dan pengalaman dan ketiga komponen memperkuat atau membentuk satu sama lain melalui proses. Kerangka kerja ini juga dapat digunakan untuk analisis hubungan yang melibatkan warga, masyarakat sipil, dan komunitas, karena mereka sering menjadi pusat dalam ekspresi perdamaian sehari-hari. Sementara perlu memetakan sifat aktor untuk studi empiris dari suatu hubungan. Fokus analisis adalah proses dinamis dari apa yang terjadi di antara para aktor, dan bagaimana mereka berinteraksi dan bergaul. Pemaparan ini menjadi dasar untuk melihat pengertian perdamaian relasional.

Perdamaian relasional adalah sebuah keadaan yang dapat disebutkan sebagai hubungan damai yang memerlukan interaksi perilaku yang dapat dicirikan sebagai non-dominasi, musyawarah dan/atau kerja sama antara para aktor dalam satu kelompok. Aktor yang terlibat mengenali dan / atau saling percaya dan percaya bahwa hubungan itu adalah salah satu di antara aktor yang sah yang pada akhirnya merupakan ekspresi persahabatan (Soderstroom, Jarstaad 2019 :7-19).

Pendekatan relasional terhadap perdamaian adalah menganalisa hubungan antara aktor atau kelompok dari mantan pihak yang berkonflik, hingga hubungan antar kelompok mayoritas dan minoritas, hingga hubungan interpersonal. Hal utama dari pendekatan ini adalah pengakuan bahwa masyarakat terdiri dari jaring hubungan dan bahwa masing-masing dari hubungan ini dapat dipelajari dalam hal karakteristik perdamaian mereka (Jarstad, dkk, 2019 :10-13).

Pendekatan relasional pada dasarnya memusatkan perhatian pada bagaimana para aktor dalam rekanan pasangan dapat berinteraksi satu sama lain. Pola interaksinya adalah non-kekerasan, kemudian bagaimana sikap yang dibangun sama lain serta gagasan para aktor tentang hubungan secara keseluruhan. Walaupun juga untuk dapat memahami perdamaian relasional perlu untuk memperhatikan konteksnya, sistem sosial dari aktor yang memiliki sejarah konflik, kualitas hubungan

antar aktor dan kelompok di tingkat sosial. Hal penting lainnya juga saat membahas perdamaian sebagai relasional memperhatikan pemahaman perdamaian yang menekankan hubungan sebagai pusat (Jarstad, 2019 :10-13)

Selanjutnya Jarstad (2019 :10-13) menyatakan komponen yang membentuk hubungan atau Komponen perdamaian relasional meliputi : *interaksi perilaku* seperti non-dominasi, musyawarah dan kerja sama; komponen *sikap Subyektif terhadap yang lain* seperti saling pengakuan satu sama lain dan saling percaya; dan *gagasan tentang hubungan* itu sebagai salah satu ko-eksistensi dan persahabatan yang sah. Pemetaan komponen perdamaian relasional tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

<i>Kategori</i>	<i>Urutan lebih rendah</i>	<i>Urutan lebih tinggi</i>
<i>Interaksi perilaku</i>	Musyawarah Non-dominasi	Kerjasama
<i>Sikap subjektif terhadap yang lain</i>	Pengakuan bersama	Saling percaya
<i>Gagasan hubungan</i>	Ko-eksistensi yang sah	Persahabatan

Tabel 1. Komponen Perdamaian Relasional

Interaksi Perilaku: Non dominasi, musyawarah, kerja sama

Inti dari non-dominasi adalah bahwa bebas dari dominasi oleh orang lain dan bebas dari kekuatan sewenang-wenang. Dalam hubungan apa pun pasti ada ketidakseimbangan kekuasaan, tetapi non-dominasi menyiratkan bahwa ketidakseimbangan kekuasaan tidak menyebabkan seorang aktor didominasi oleh yang lain tanpa alasan yang sah yang diakui oleh kedua aktor. Non-dominasi adalah elemen penting dari perdamaian relasional. Non-dominasi adalah membahas jenis kebebasan, yang tidak didominasi oleh yang lain dan bebas dari kekuasaan sewenang-wenang. Dominasi dapat terjadi jika aktor yang didominasi menunjukkan pola membatasi atau menyensor perilaku mereka karena pengaruh potensial dari aktor yang lebih kuat.

Interaksi perilaku perdamaian yang berikutnya adalah *musyawarah*. Gagasan inti di balik musyawarah adalah pertukaran pandangan yang dikombinasikan dengan para aktor yang terlibat memberikan alasan untuk posisi mereka. Aspek penting dari musyawarah adalah memungkinkan perbedaan untuk diekspresikan, diakui dan ditegaskan. dan bahwa ia memandang ketidaksepakatan sebagai bagian penting dan vital dari keterlibatan politik dan transformasi hubungan yang damai. Musyawarah perdamaian, harus ditekankan, bukanlah pencarian untuk homogenitas, konsensus, atau pandangan umum tentang seperti apa perdamaian harus terlihat, karena ini tidak ada di masyarakat mana pun, dan tentu saja tidak dalam masyarakat pascaperang. Dengan menerima perbedaan pendapat dan ketidaksepakatan yang luas dalam musyawarah perdamaian, dan mengakui bentuk komunikasi yang lebih luas — seperti

kesaksian, penceritaan, atau retorika — perdamaian dapat diinvestasikan dengan karakteristik lokal. Oleh karena itu, prakondisi untuk musyawarah adalah, oleh kebutuhan, santai dalam musyawarah perdamaian pasca-konflik. Untuk menangkap dimensi relasional praktik musyawarah, beberapa sarjana menekankan dialog sebagai tempat untuk mengubah hubungan.

Tingkatan berikut dari interaksi perilaku ini adalah *kerja sama*. Proses ini adalah sebuah 'pengejaran aktif perilaku kooperatif di dalam dan antara pihak yang berlawanan' untuk menangkap interaksi perilaku damai. Pengertian ini berangkat dari definisi kerja sama yang relasional, di mana para aktor terlibat bekerja dan bertindak bersama pada masalah bersama alih-alih bersaing. Ada tiga tingkat di mana kerja sama beroperasi yang pertama yaitu pada kelompok tingkat dasar atau individu dengan tujuan terpisah membuat gerakan yang menguntungkan yang lain, karena mereka mengharapkan gerakan yang sama sebagai imbalan atau karena mereka menghargai manfaat yang lain. Pada tingkat kedua, mereka mengadopsi tujuan atau menyelaraskan tujuan mereka satu sama lain, dan ketiga kelompok atau individu mengidentifikasi kepentingan bersama, sehingga juga memulai proses mendefinisikan kembali diri mereka sendiri.

Sikap subjektif terhadap satu sama lain: saling pengakuan dan saling percaya

Hubungan damai tidak semata-mata terdiri dari tindakan yang diarahkan pada yang lain, atau dengan yang lain (pola perilaku interaktif). Sebuah hubungan juga terdiri dari keyakinan subjektif, emosi, sikap tentang yang lain, serta pemahaman tentang hubungan itu sendiri. Pengakuan dan kepercayaan menjadi syarat untuk keyakinan damai, emosi atau sikap tentang kondisi subjektif lainnya seperti yang disebut dalam model hubungan.

Pengakuan adalah bagian sentral dari hubungan. Pengakuan adalah 'tekad seorang aktor untuk mengedepankan citra diri seseorang. Pengakuan apalagi relasional harus dipahami sebagai bagian dari interaksi dalam hubungan aktor; hubungan antar-subjektif yang dibangun melalui hubungan antara gambar aktor.

Selanjutnya adalah sentralitas *kepercayaan untuk perdamaian* dan dalam pembangunan perdamaian. Semakin tinggi tingkat saling percaya 'semakin solid hubungan damai'. Kepercayaan adalah kunci untuk kerja sama. Kepercayaan adalah keadaan psikologis yang terdiri dari niat untuk menerima berdasarkan ekspektasi positif terhadap niat atau perilaku orang lain'.

Gagasan Hubungan: persahabatan dan ko-eksistensi yang sah

Hubungan yang dianggap sebagai salah satu *persahabatan* itu memenuhi syarat sebagai benar-benar damai, sedangkan di mana yang lain dipandang memiliki hak untuk hidup berdampingan dan di mana dianggap sah untuk terlibat dalam interaksi kooperatif. Namun juga hubungan tidak perlu menjadi salah satu persahabatan, tetapi itu juga bukan satu di antara musuh. Jarstad (2019 :10-13) menyebutkan status hubungan itu sebagai *ko-eksistensi yang sah*. Hubungan antar teman berarti mengenal satu sama lain dengan baik dan menghargai satu sama lain, sedangkan dalam hubungan ko-eksistensi yang sah para aktor hanya bergaul satu sama lain, dan hubungan itu mungkin masih sebagian besar ditentukan oleh kepentingan diri sendiri. Ko-eksistensi sah semacam ini tidak memerlukan syarat untuk berkolaborasi atau bekerja sama; hanya penerimaan keberadaan yang lain dan jika satu begitu

berharap yang lain dianggap sebagai orang lain yang sah yang dapat berinteraksi secara disengaja atau bekerja sama.

Perdamaian relasional bukan tanpa tantangan, interaksi berulang cenderung mendorong hubungan menuju perdamaian yang lebih dalam atau juga dangkal. Guncangan dari pihak luar tidak dapat diabaikan juga seperti pengenalan aktor tambahan dalam hubungan, pergeseran minat, pergeseran sumber daya dan pergeseran konteks, hal yang sudah disebutkan sebelumnya cenderung berdampak pada hubungan juga. Hal ini berarti perdamaian relasional bukanlah kondisi statis, tetapi fenomena dengan daya tahan terbatas atau diperpanjang.

Jika melihat komponen daripada perdamaian relasional, memperjelas bagaimana hubungan dan interaksi yang terjadi diantara para aktor di masa pasca konflik, atau setidaknya mereka yang terdampak dari konflik tersebut dapat mewujudkan keadaan damai. Pembangunan perdamaian yang bertujuan mencegah konflik dan kekerasan yang berlarut dapat terlaksana jika hubungan atau relasi para aktor dapat terlihat dengan komponen-komponen perdamaian relasional. Bagaimana pembangunan perdamaian relasional tersebut dapat terlaksana di Kabupaten Poso? Salah satu kerangka kerja yang dapat ditawarkan adalah melalui kegiatan pendidikan, yang disebut pendidikan perdamaian.

Pendidikan perdamaian

Pendidikan perdamaian mulanya adalah studi tentang kekerasan dan penyebabnya, kemudian berkembang menjadi mempelajari kekerasan dalam segala manifestasinya dan mendidik untuk menangkal sistem perang untuk penciptaan sistem perdamaian baik pada tingkat struktural maupun internasional (Harris, 2004 :5-20). Johan Galtung dalam Christoph Wulf, (1974 :153-156) mengatakan bahwa pendidikan perdamaian adalah cara untuk mencapai, secara individu dan kolektif, tingkat kesadaran yang lebih tinggi, kesadaran akan realitas sosial untuk mempromosikan wawasan perdamaian. Ia menegaskan bahwa Pendidikan perdamaian bukanlah mekanisme untuk prestasi dan klasifikasi sosial.

Kemudian definisi pendidikan perdamaian mengalami berbagai perkembangan. Harris, (2004 :5-20) mengatakan bahwa pendidikan perdamaian berarti filosofi dan proses:

'Proses ini melibatkan pemberdayaan orang-orang dengan keterampilan, sikap, dan pengetahuan untuk menciptakan dunia yang aman dan membangun lingkungan yang berkelanjutan. Filosofi tersebut mengajarkan non-kekerasan, cinta, kasih sayang dan penghormatan untuk semua kehidupan'. (Harris, I.M. 2004 :5-20)

Menurut Ian Harris (2004 :5-20), tugas pendidikan perdamaian adalah mentransmisikan rasa kekuasaan dan menjadi alat yang tepat untuk aksi perdamaian. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa:

pendidikan perdamaian adalah sebuah kegiatan pendidikan yang sistematis dan terencana bagi anak atau kelompok yang bertujuan mendukung, mengarahkan dan mempengaruhi perkembangan pemikiran, perasaan, pengetahuan dan keterampilan. Tujuan utamanya adalah untuk membawa perdamaian ke dunia dengan peserta didik sebagai 'agen mediasi'. (Harris, I.M. 2004 :5-20)

Terdapat pengertian pendidikan perdamaian berbeda di berbagai tulisan, sebab fokus dan pengembangan pendidikan perdamaian berbeda disetiap tempat, sesuai dengan situasi konflik atau kekerasan yang terjadi di daerah tersebut. Seperti kata Navarro (2019 :17-43) pendidikan perdamaian multidimensional dan holistik dalam isi dan prosesnya. Pendidikan perdamaian terdiri dari banyak tema dan bentuk yang telah berkembang di berbagai belahan dunia. Ini mencerminkan pertumbuhan pendidikan progresif dan gerakan sosial dalam lima dekade terakhir. Di antara berbagai bentuk atau aspek praktik pendidikan perdamaian adalah: Pendidikan Perlucutan Senjata, Pendidikan Hak Asasi Manusia, Pendidikan Global Pendidikan Resolusi Konflik, Pendidikan Multikultural, Pendidikan untuk Pemahaman Internasional, Pendidikan Antaragama, Pendidikan Gender-adil / Nonseksual, Pendidikan Pembangunan dan Pendidikan Lingkungan. Masing-masing berfokus pada masalah kekerasan langsung atau tidak langsung. Setiap bentuk praktik pendidikan perdamaian juga mencakup basis pengetahuan tertentu serta seperangkat keterampilan normatif dan orientasi nilai yang ingin dikembangkannya. Namun semua mengacu pada filosofi non-kekerasan, cinta, kasih sayang dan penghormatan untuk semua kehidupan'.

Peran Pendidikan perdamaian terhadap Pembangunan Perdamaian relasional

Pembangunan perdamaian pada dasarnya adalah sebuah strategi jangka panjang untuk membangun sebuah budaya damai pada masyarakat. Karena itu pendidikan adalah strategi yang penting untuk mencapai kondisi damai jangka panjang tersebut. Pendidikan juga berkontribusi pada transformasi dalam masyarakat pasca-konflik dalam hal perubahan sikap dan perilaku terhadap kekerasan (Unicef, 2011 :7-22).

Mengapa melalui Pendidikan? Kapur (2018 :1-5) menjelaskan bahwa pendidikan secara intens dikaitkan dengan prosedur sosialisasi dan pembentukan karakter, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kemajuan individu dan nasional dan dapat bertindak sebagai media kunci untuk konsistensi sosial. Selanjutnya dikatakan bahwa Pembangunan perdamaian pada dasarnya adalah tentang mendukung proses transformatif yang perlu diterapkan masyarakat pasca-konflik, dan transformasi ini mengklarifikasi selama beberapa generasi. Ekspansi melalui sektor pendidikan melambangkan bagian yang sangat kritis dari proses transformatif ini, dengan prospektif yang besar untuk berdampak secara konstruktif. Artinya pendidikan merupakan bidang yang signifikan dalam proses transformatif di masyarakat pasca konflik, yang berproses lewat pembangunan perdamaian. Perubahan dalam masyarakat bisa terjadi karena peran bahkan fungsi dari pendidikan. Pendidikan sangat berperan pada pemeliharaan sistem yang terjadi di masyarakat. Maka ketika pembangunan perdamaian menjadi kebutuhan pada masyarakat pasca konflik, yang menjadi perhatian utamanya adalah pada pelestarian masyarakat dan penguatannya struktur dan perannya. Penguatan itu dilakukan sehingga masyarakat peduli dengan pelestarian perdamaian dan kesejahteraan umum semua anggotanya, pendidikan secara alami berkontribusi pada proses tersebut.

Selanjutnya bagi Guetta (2013 :167-179) ia melihat bahwa Pendidikan menjadi strategi, media, keterlibatan sosial yang mendasar dan perlu, untuk membuka jalan

bagi perdamaian. Ia berpandangan tentang suatu kegiatan yang sistematis dan terukur untuk bisa membangun dan merubah masyarakat, yaitu pendidikan. Kegiatan pendidikan menjadi alat yang terukur untuk membentuk masyarakat karena dalam prosesnya menggunakan metode serta alat belajar yang memungkinkan, yang membuat individu dapat mengidentifikasi perbedaan dan keadilan sosial. Guetta melihat sebuah proses yang tertib dan signifikan yaitu pendidikan untuk perubahan dalam masyarakat.

Elisson (2012 :1-22) mengidentifikasi lima alasan rasional untuk cara-cara di mana pendidikan berkontribusi pada pembangunan perdamaian. Kelima alasan itu adalah : pelatihan keterampilan menyediakan rute selain kekerasan, pendidikan melindungi anak-anak, pendidikan membantu membangun kembali 'normalitas', pendidikan membantu membentuk tanah yang hilang, pendidikan berkontribusi pada transformasi sosial.

Pelatihan keterampilan menyediakan rute selain kekerasan, maksudnya adalah pelatihan keterampilan dapat mengarah pada pekerjaan dan berkontribusi pada transformasi sosial jangka panjang menuju populasi yang aktif secara ekonomi dan terintegrasi oleh karena itu investasi pribadi dalam kegiatan ini sangat baik daripada melakukan kekerasan

Pendidikan melindungi anak anak, bermaksud bahwa pendidikan pendidikan menawarkan perlindungan dari kekerasan sehingga respons dini dapat menghentikan dampak negatif dan memberikan fondasi untuk pemulihan. Bukti juga menunjukkan bahwa pendidikan dapat memberikan perlindungan melalui peluang untuk perkembangan psikologis, emosional dan kognitif. Ini tidak hanya didasarkan pada fakta bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia, tetapi juga gagasan bahwa pendidikan menawarkan perlindungan kepada manusia dalam konteks bencana. Dikatakan bahwa sekolah adalah tempat yang aman yang menawarkan perlindungan fisik dari bahaya dan membantu melindungi dari eksploitasi dan perekrutan.

Pendidikan membantu membangun kembali 'normalitas', Sekolah dapat membantu mengembalikan rasa stabilitas, normalitas dan kepercayaan diri pada kehidupan siswanya dan mengembalikan iman pada kemampuan negara untuk memberikan layanan bagi warganya.

Pendidikan membantu membentuk tanah yang hilang. Warga berpendidikan membantu suatu negara pulih dari efek kekerasan. Pendidikan juga dapat memberikan perlindungan terhadap kekerasan di masa depan dengan meningkatkan biaya kesempatan perang individu, mengatasi keluhan melalui kesetaraan akses ke pendidikan dan mempromosikan pemikiran kritis.

Pendidikan berkontribusi pada transformasi sosial, Pengaruh pendidikan dapat meluas ke luar sekolah untuk mendukung transformasi yang lebih luas di sektor keamanan, politik, sosial dan ekonomi dan perubahan hubungan dan perilaku dari negatif ke positif. Menumbuhkan 'infrastruktur untuk perdamaian' berarti bahwa kita tidak hanya saling dilengkapi dalam 'mengakhiri' sesuatu yang tidak diinginkan, namun lebih berorientasi pada membangun hubungan yang secara totalitasnya membentuk pola, proses, dan struktur baru

Pemaparan Ellison (2012 :1-22) sebelumnya tentang lima alasan rasional ini berangkat dari situasi pasca konflik di Sierra Leon. Hal ini memberi ketegasan tentang

bentuk perubahan masyarakat dari “konflik” ke “damai” berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ellison menjelaskan tentang betapa pentingnya pendidikan dan keterlibatan masyarakat di dalamnya untuk perubahan transformasi masyarakat dalam pembangunan perdamaian. Alasan rasional ini memperlihatkan juga bagaimana pendidikan mempersiapkan pesertanya untuk bisa melakukan perubahan pola pikir tentang kehidupan bersama, hubungan antar manusia, dan membangun suatu daerah dengan cara-cara nirkekerasan. Sangat jelas bahwa pentingnya pendidikan untuk dapat menjaga ranah psikososial dan kognitif pesertanya untuk melihat sesama manusia dalam hubungan yang setara, dan trampil membangun peta jalan damai. Senada juga dengan hasil laporan literatur review oleh Unicef (2011 :7-22) yang mengatakan pendidikan dapat berkontribusi pada transformasi dalam masyarakat yang terkena dampak konflik yang mungkin membuat perdamaian menjadi mungkin dan lebih mungkin bertahan - yaitu, pendidikan yang berkontribusi pada pembangunan perdamaian. Pendidikan adalah elemen penting dalam perlindungan fisik, psikososial dan kognitif saat masyarakat mengalami konflik. Pendidikan juga dapat memberikan perlindungan kognitif dengan mendukung perkembangan intelektual melalui pengajaran literasi dan numerasi dan, dalam beberapa kasus, penyelesaian konflik dan keterampilan pembangunan perdamaian. Pendidikan menjadi bagian dari struktur pembangunan perdamaian (Wibisono,2013 :316), dan sangat berperan untuk mempersiapkan peserta didiknya bagi sebuah perdamaian relasional yang mengedepankan hubungan antar manusia.

Metode penelitian

Penulisan makalah ini memakai metode penelusuran literatur dan tetap mendasarkan kondisi obyektif Pendidikan perdamaian di Sekolah Perempuan baik dari modul pembelajaran sekolah perempuan maupun dari makalah sebelumnya tentang “Model Pendidikan Perdamaian 'ramah perempuan' di Sekolah Perempuan perdamaian Kabupaten Poso (Tachoh,2017 :197-220). Penelusuran literatur yang pertama adalah mencari literatur tentang kondisi pembangunan perdamaian di Poso, kemudian mencari konsep pembangunan perdamaian dan perdamaian relasional. Penelusuran literatur terakhir adalah menelaah dokumen Sekolah Perempuan yaitu Modul pembelajaran dengan fokus utama pada pendidikan perdamaian, serta literatur yang mengulas kegiatan pembelajaran di Sekolah Perempuan.

Pembahasan

Pendidikan Perdamaian di Sekolah Perempuan dan kontribusinya pada pembangunan perdamaian resional

Pada bagian diskusi ini akan gambarkan hubungan antara pelaksanaan pendidikan perdamaian di Sekolah Perempuan dan pembangunan perdamaian relasional dengan teori-teori yang dijelaskan sebelumnya. Kegiatan pendidikan perdamaian yang akan dibahas adalah *Tujuan Pendidikan perdamaian, Proses interaksi peserta* sekolah perempuan, *model pendidikan perdamaian* mencakup materi utama dan metode yang dipakai. Penggambaran hubungan ini mencakup bagaimana kegiatan pendidikan perdamaian tersebut dapat berkontribusi pada

komponen perdamaian relasional, yaitu *interaksi perilaku* seperti non-dominasi, musyawarah dan kerja sama; komponen *sikap Subyektif terhadap yang lain* seperti saling pengakuan satu sama lain dan saling percaya; dan *gagasan tentang hubungan* itu sebagai salah satu ko-eksistensi dan persahabatan yang sah.

Pada tulisan dari Tacoh (2017 : 197-220) telah cukup jelas pengkajian tentang rencana dan dasar pendirian sekolah perempuan perdamaian oleh AMAN Indonesia (Asian Muslim Action Network) di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Poso. Sekarang ini jumlah Sekolah Perempuan ada 18 sekolah. Karena itu pada penggambaran berikut tidak lagi menguraikan secara rinci seluruh proses model pendidikan perdamaian di sekolah tersebut, namun hanya menjelaskan bagian-bagian yang penting untuk mendapatkan penggambaran tentang kontribusinya bagi pembangunan perdamaian relasional di Kabupaten Poso.

Tujuan Pendidikan Perdamaian di Sekolah perempuan dan hubungannya dengan perdamaian relasional

Tujuan Pendidikan Perdamaian di Sekolah perempuan adalah memperkuat pemahaman tentang pembangunan perdamaian, dalam diri perempuan, teralaminya sebuah kesadaran perubahan perilaku untuk budaya yang peka terhadap upaya pembangunan perdamaian, meningkatnya ketrampilan untuk memahami budaya dan lingkungan sekitar, mendorong perempuan untuk berperan serta dalam mendorong perubahan struktur untuk pencapaian kebutuhan dasar manusia, melalui peran aktif dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Tacoh, 2017 :197-220). Tujuan ini menggambarkan komitmen yang kuat dari penyelenggaraan pendidikan perdamaian untuk membangun perdamaian, dan secara khusus bagi kaum perempuan. Penyelenggaraan pendidikan perdamaian ini memperlihatkan upaya untuk kehidupan damai secara jangka panjang bagi Kabupaten Poso yang lahir dari masyarakat itu sendiri, dan ini menjadi kontribusi nyata bagi pencegahan konflik dan membangun budaya damai sesuai karakteristik dari pembangunan perdamaian. Namun bukan hanya mempersiapkan peserta untuk melakukan atau praktek perdamaian, tetapi bagaimana pemberlakuan perdamaian itu dapat mempengaruhi kondisi masyarakat serta terjadi sebuah perubahan struktur yang mendasar tentang pembangunan perdamaian. Seperti yang dikatakan Bretherton (2005 :219-230) bahwa tujuan dari pendidikan perdamaian adalah untuk menarik keluar, memperkaya, memperdalam dan menempatkan dalam konteks pemikiran peserta tentang konsep perdamaian. Pelajaran yang harus dipelajari bukan hanya isi konsep tetapi juga pemberlakuan dan melakukannya - yaitu metodologi perdamaian. Mengingat bahwa perdamaian aktif dan partisipatif, pedagogi pendidikan perdamaian sangat penting. Perdamaian bukan hanya apa yang dilakukan tetapi juga kualitas cara di mana ia dilakukan.

Terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan dari kemandirian masyarakat pasca konflik adalah hal yang signifikan untuk perdamaian ideal. Seperti yang dikatakan Galtung bahwa dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan, struktur pembangunan perdamaian harus mencakup pemahaman penyebab konflik kekerasan dan kapasitas lokal yang dapat mendukung manajemen perdamaian dan penyelesaian konflik (Galtung,1976 :297-298). Dalam kaitannya dengan perdamaian

relasional, tujuan pendidikan perdamaian ini berkontribusi mempersiapkan aktor dalam hal ini kaum perempuan untuk terlibat langsung pada hubungan antar sesama manusia di tengah masyarakat dalam aktivitas harian. Sebab, dengan mengikuti kegiatan pendidikan perdamaian para peserta diharapkan tidak lagi canggung untuk berinteraksi dengan masyarakat bahkan sekalipun saat konflik mereka pernah menjadi pihak lawan.

Menyasar pesertanya kaum perempuan mempunyai maksud bahwa keseluruhan aktivitas di sekolah tersebut, untuk memperlengkapi kaum perempuan dalam kiprah dan perannya menjadi agen untuk pembangunan perdamaian. Maksud memberdayakan perempuan untuk menjadi agen perdamaian dilakukan dengan memanfaatkan aspek-aspek dan watak feminisnya seperti kelembutan, dan sejak awal perempuan sangat dekat dengan kehidupan. Karena perempuan memang menangani kehidupan sejak awal hidup manusia; dia yang memulai kehidupan di rahim. Naluri seorang pemelihara kehidupan tentu akan merasa tidak rela melihat kehidupan dihentikan dengan saling membunuh (AMAN,2010). Sekolah Perempuan, sangat mengakomodir aktualisasi diri perempuan untuk mengenal siapa dirinya dan lingkungannya, dan mau membangun karakteristik penting perempuan.

Karakteristik perempuan pada aspek kelembutan dan dekat dengan kehidupan bahkan sejak awal dalam rahim, menjadi karakter khusus yang membuat seorang perempuan sangat mudah membangun hubungan pertemanan, kerjasama, saling percaya dan bahkan membangun persahabatan. Jika dihubungkan dengan perdamaian relasional, maka apa yang dibangun perempuan untuk saling berhubungan ada pada indikator atau komponen perdamaian relasional tersebut yaitu aspek pertemanan, kerjasama dan saling percaya. Membangun "rasa saling percaya" dalam suatu hubungan bukanlah hal yang mudah mengingat aktor dalam hubungan tersebut pernah "bermusuhan". Tetapi perempuan dapat melampaui keadaan masa lalu dengan keterbukaan pada kehidupan yang lebih harmoni dengan membangun hubungan yang dilandasi rasa percaya. Astuti Dewi, (2013 :290-307) menyebutkan bahwa perempuan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan dalam masyarakat dengan membesarkan anak-anak agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, berperilaku jujur, dan menghargai orang lain. Peran ini disebut sebagai promotor harmoni dalam masyarakat dan budaya perdamaian. Sebab pada dasarnya perempuan tidak ingin mematikan kehidupan, sehingga dia ingin merawat kehidupan salah satunya membangun hubungan, dan melihat manusia lain sebagai sesama.

Proses interaksi antara peserta di Sekolah Perempuan Perdamaian dan hubungannya dengan perdamaian relasional

Pada kajian model pendidikan perdamaian di sekolah perempuan ini, Tacoh (2017 :197-220) menjelaskan mengapa sekolah ini berfokus pada pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Sebab di tempat inilah ruang bagi perempuan untuk mengekspresikan hasrat belajar, termasuk belajar pengalaman sesama secara terencana. Kajian pada tulisan tersebut juga menyebutkan bahwa peserta sekolah perempuan terdiri perempuan lintas agama dan suku yang ada di daerah Kabupaten Poso, baik yang merupakan korban saat konflik, maupun yang mengalami langsung

situasi konflik. Interaksi langsung dengan sesama perempuan pasca konflik tentu tidak dapat dihindari.

Proses interaksi dalam kegiatan pendidikan perdamaian tersebut menghasilkan sikap-sikap yang lebih percaya diri dan lebih aktif dalam proses pembangunan perdamaian. Hal ini nampak dari suara perempuan sebagai peserta yang mengatakan bahwa mereka memiliki kemampuan saling melupakan dendam, peningkatan kemampuan dan keberanian berdialog. McKay (2002 :123-146) mengatakan bahwa empat cara utama untuk mengidentifikasi partisipasi perempuan dalam pembangunan perdamaian adalah memprioritaskan pengampunan dan penyembuhan, transformatif, dan pemberdayaan, dan memperjuangkan keadilan gender. Metode ini dapat disebut sebagai cara tanpa kekerasan (gerakan non-kekerasan) yang merupakan karakteristik perempuan dalam pembangunan perdamaian. Pengampunan sangat penting untuk rekonsiliasi karena tanpa saling memaafkan, akan ada dendam yang belum terselesaikan di masa depan yang dikhawatirkan akan menjadi motif kekerasan lebih lanjut.

Interaksi yang mengedepankan sikap dan tindakan pengampunan, saling melupakan dendam, dan keberanian serta kemampuan berdialog adalah interaksi yang terbangun dari keadaan merasa setara, tidak mendominasi dan mempraktekkan musyawarah serta pengakuan bersama. Perasaan dan praktek ini adalah bagian dari komponen perdamaian relasional. Non-dominasi adalah elemen penting dari perdamaian relasional yang memperlihatkan kesetaraan. Kemampuan berinteraksi di sekolah perempuan, kemampuan saling memaafkan dan melupakan dendam memperlihatkan mereka sudah dapat menerima keberadaan sesama peserta atau perempuan sebagai bagian dari kehidupan bersama. Kesetaraan terlihat di sini. Sikap percaya diri yang muncul dalam interaksi tersebut memperlihatkan sikap bebas dari dominasi siapapun. Non-dominasi adalah membahas jenis kebebasan, yang tidak didominasi oleh yang lain dan bebas dari kekuasaan sewenang-wenang. Selanjutnya kemampuan dan keberanian untuk berdialog hal ini memperlihatkan praktek musyawarah. Dimensi relasional praktek musyawarah adalah dialog. Musyawarah adalah pertukaran pandangan yang dikombinasikan dengan para aktor yang terlibat memberikan alasan untuk posisi mereka. Aspek penting dari musyawarah adalah memungkinkan perbedaan untuk diekspresikan, diakui dan ditegaskan, dan bahwa ia memandang ketidaksepakatan sebagai bagian penting dan vital dari keterlibatan politik dan transformasi hubungan yang damai. Musyawarah perdamaian, harus ditekankan, bukanlah pencarian untuk homogenitas, konsensus, atau pandangan umum tentang seperti apa perdamaian harus terlihat.

Shulika (2018 :113-162) mengatakan bahwa karakteristik dan kekuatan perempuan seperti ini membuat perempuan dapat bertahan dalam penderitaan konflik bahkan mampu mengambil inisiatif untuk menerobos "area musuh" demi mempertahankan kehidupan dengan memberdayakan diri mereka. Dengan memperhitungkan tekad perempuan untuk memberdayakan diri mereka dan secara proaktif mengolah perdamaian selama konflik dan mengadvokasi hak-hak mereka ini menjelaskan mengapa dalam fase korban konflik dan bencananya, perempuan bekerja dengan cara mereka untuk mengambil peran perdamaian yang lebih aktif dengan terutama terlibat dalam organisasi perempuan. Sebab keinginan utama

perempuan adalah kembalinya normalisasi perdamaian dan keamanan untuk mendasari pertumbuhan kehidupan yang lebih baik. Analisis ini mempertegas bagaimana peserta sekolah perempuan dapat melakukan berbagai praktek perdamaian seperti melupakan dendam dan meningkatkan kemampuan berdialog. Itulah sebabnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan perdamaian relasional ini sangat penting dan relevan untuk realisasi pembangunan perdamaian yang praktis, karena proses pembangunan perdamaian memerlukan dimensi sipil aktif dan kepemilikan proses rekonstruksi oleh masyarakat sipil, dan itu ada pada perempuan (Shulika, 2018:113-162).

Materi dan Metode Pendidikan Perdamaian di Sekolah Perempuan dan hubungannya dengan perdamaian relasional

Muatan kurikulum pendidikan perdamaian di sekolah perempuan dapat dilihat pada Modul dengan tema-tema beragam (Tacoh, 2017 :197-220). Tema dalam modul tersebut mencakup Transformasi Individual, Transformasi relasional, Transformasi kultural, dan Transformasi Struktural. Pada tema Transformasi Individual membahas identitas perempuan, gender dalam perpektif agama, peran perempuan dalam pembangunan perdamaian. Materi ini bertujuan mengokohkan kepercayaan diri perempuan untuk menjadi agen perdamaian. Penguatan individu perempuan penting untuk perubahan pola pikir tentang perdamaian. Perubahan pola pikir kemudian akan menjadi karakter yang kokoh dan menjadi skill untuk membangun keluarga dan lingkungannya tentang kehidupan damai. Pendidikan perdamaian melalui materi ini membuat perempuan sebagai peserta didik di sekolah tersebut menjadi agen promotor harmoni yang memperagakan pentingnya sebuah relasi damai di dalam masyarakat

Transformasi relasional lebih menyoroti pembahasan menyangkut hubungan dengan sesama aktor korban konflik, seperti : Analisa Konflik dan Perdamaian, Menghargai dan Menerima Perbedaan, Komunikasi Efektif dan Nir kekerasan, Negosiasi, Mediasi. Kajian di tema relasional ini memperlihatkan dengan jelas bagaimana materi di Sekolah perempuan tersebut membahas dan mengajak perempuan sebagai peserta lintas iman untuk melakukan hubungan yang lebih bermakna setelah melewati masa sulit yaitu konflik dan kekerasan komunal. Diakui bahwa perempuan cenderung menghindari percakapan yang menyebabkan cedera masa lalu yang berpotensi menciptakan dendam yang belum terselesaikan. Sehingga dapat dipastikan pembahasan perdamaian akan lebih relevan dalam pertemuan bersama dengan aktor korban konflik lainnya di sekolah tersebut, dan lebih mengedepankan penghargaan kepada sesama manusia dan mampu melakukan mediasi (Kristimanta, 2018 :1-15) Sebagaimana dikatakan pendidikan perdamaian adalah serangkaian proses untuk membentuk skill, juga adalah suatu filosofi untuk keadaan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan atau hak hidup manusia universal (Standish, 2015 :299-312; Synott 2005 :3-16; Page, 2004 :3-15). Hal ini sangat relevan dengan komponen perdamaian relasional, yaitu hubungan yang terbangun karena adanya pengakuan bersama, rasa saling percaya dan persahabatan. Bukanlah hal yang mudah untuk membangun itu dalam keadaan para aktor tersebut pernah dalam posisi berkonflik. Tetapi Materi transformasi relasional mewedahi mereka untuk

berani bicara analisa konflik masa lalu, menghargai menerima perbedaan dan komunikasi serta negosiasi.

Selanjutnya kajian untuk pemberdayaan perempuan terlihat dari pendekatan pendidikan yang dilakukan untuk membangun rasa percaya diri perempuan dan sikap mandiri mereka. Secara khusus pada topik transformasi kultural. Kemudian kajian yang menekankan pendekatan berdasarkan pada situasi hubungan sosial masyarakat, perubahan struktur sistem dan kegiatan ekonomi, seperti yang terlihat topik Transformasi struktural. Materi atau muatan kurikulum tersebut di atas memperlihatkan dengan jelas bahwa melalui kegiatan pendidikan perdamaian ini diharapkan perempuan akan lebih percaya diri menyampaikan pengetahuannya kepada orang-orang sekitar dan masyarakat luas. Sirkulasi pengetahuan pembangunan perdamaian inilah yang diharapkan mampu mempengaruhi tindakan sehari-hari masyarakat (Tacoh, 2017 :197-220), dan mereka semakin termotivasi dalam membangun relasi harmoni.

Materi pendidikan perdamaian ini memperlihatkan bahwa pesertanya diproses untuk membangun perdamaian relasional dulu diantara sesama partisipan atau aktor, kemudian mereka dapat berkontribusi menjadi teladan bagi masyarakat tentang hubungan yang setara, bermakna, bisa bekerja sama, tidak saling mendominasi. Perdamaian relasional terjadi terlebih dahulu diantara sesama perempuan, kemudian diharapkan berkembang lebih luas di kalangan masyarakat.

Metode yang dipakai dalam kegiatan pendidikan perdamaian di sekolah perempuan adalah metode yang familiar atau akrab dengan kaum perempuan, sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan dan karakteristik peserta perempuan dan efektivitas tersampainya pesan perdamaian sesuai materi. Metode pembelajaran senantiasa dilakukan secara kreatif dan tidak monoton seperti *storytelling*, curahan hati, menulis surat, perkunjungan, bermain, nonton film hingga diskusi (Tacoh, 2017 :197.220). Metode ini juga membuka ruang dan mendorong kaum perempuan menyampaikan pendapat secara aktif, mengkespresikan dirinya dengan cara sendiri, sehingga lebih terbuka dalam bertanya, berargumentasi setuju atau tidak. Metode ini menunjukkan bagaimana kegiatan pendidikan perdamaian sangat menghargai hak seseorang untuk berbicara dan berpendapat. Hasil studi Almagro (2018 :1-16) yang mengangkat pendekatan feminis pada salah satu komunitas yang bergerak untuk pembangunan perdamaian menunjukkan bahwa metode *storytelling*, dan pengungkapan diri sangat memberi ruang pada suatu hubungan atau relasi antar individu. Karena di situ terjadi saling belajar dan menerima di antara sesama komunitas dan pada akhir membangun hubungan dan keterikatan untuk saling melengkapi. Metode dalam pendidikan perdamaian di sekolah perempuan memperjelas ruang-ruang berbagi dan berelasi untuk kemudian menjadi perilaku dan ketrampilan membangun kehidupan damai dalam relasi dengan sesama di masyarakat.

Analisis terhadap metode dan materi pendidikan perdamaian ini mengacu kepada tulisan Havelruud (2012 :65-80) yang melihat keterkaitan antara konten, bentuk dan kondisi kontekstual yang mempengaruhi bentuk dan konten pendidikan perdamaian di suatu lembaga pendidikan. Konten yang dimaksud adalah materi pendidikan perdamaian yang didasarkan pada apa masalah perdamaian yang ada.

Sedangkan bentuk pendidikan perdamaian yang dimaksud adalah metode komunikasi yang digunakan dalam insiatif pendidikan perdamaian dalam beberapa cara. Adapun kondisi kontekstual yang dimaksud tidak hanya mengacu pada karakteristik budaya, ekonomi, sosial dan politik masyarakat dan dunia secara keseluruhan, tetapi juga karakteristik khusus masyarakat setempat dan sekolah sebagai institusi dalam masyarakat. Analisis Havelsruud (2012 :65-80) membantu melihat kesesuaian konten, bentuk pendidikan perdamaian di Sekolah Perempuan dan kondisi kontekstual masyarakat Poso. Melihat kondisi kegagalan rekonsiliasi di Poso, dan masih terdapat kondisi traumatik serta untuk kembali ke tempat asal, pada sebagian korban, dan masih terdapat segregasi penduduk maka masalah perdamaian di Poso menurut Havelsruud (2012 :65-80) diantaranya adalah masalah hubungan antara aktor dan bagaimana hubungan dan interaksi selalu tertanam dalam kondisi kontekstual tertentu. Ia mengatakan bahwa Apa yang dianggap sebagai masalah perdamaian memiliki konsekuensi besar untuk pemilihan konten pendidikan perdamaian. Karena masalah perdamaian adalah masalah yang melibatkan kondisi kontekstual - dan pedagogi perdamaian adalah alat definisi menuju transformasi kondisi kontekstual yang bermasalah. Sebab itu materi atau konten pendidikan perdamaian di sekolah perempuan lebih terarah pada mempersiapkan atau memperlengkapi peserta pada resolusi konflik, bukan pada konten demokrasi atau ekologi. Secara khusus konten pendidikan perdamaian di sekolah perempuan mengarah kepada pemberdayaan aktor sebagai agen perdamaian, untuk membangun hubungan dalam masyarakat, dan mencegah konflik berulang seperti yang pernah terjadi di Poso.

Mengacu pada pemilihan metode dan alasan pemilihan metode yang dilakukan di kegiatan pendidikan perdamaian disekolah perempuan, maka dapat dikatakan bahwa bentuk pendidikan perdamaian di sekolah perempuan atau bentuk komunikasi pada sekolah tersebut adalah mengacu pada integrasi antara pengetahuan dan praktik (Havelsruud,2012 :65-80). Integrasi pengetahuan dan praktik yang dimaksud di sini adalah kondisi interaksi di sekolah tersebut merupakan pertemuan langsung antara aktor yang saat konflik saling berlawanan. Sehingga mereka bukan hanya belajar teori resolusi konflik tetapi juga langsung mempraktekkan dan menjalin hubungan dengan sesama peserta. Bentuk pendidikan perdamaian seperti ini disebut pembelajaran pengalaman, artinya lebih banyak mengambil bentuk pada kondisi pesertanya dengan pendekatan konsiliasi kemudian konten dikembangkan dengan format dialogis, dimana tema generatif dikelompokkan dalam suatu dialektika berkelanjutan antara praktik budaya dalam kehidupan sehari-hari dan pemahaman teoritis.

Analisis hubungan antara konten, bentuk dan kondisi kontekstual terhadap materi pendidikan perdamaian di sekolah perempuan memperlihatkan bahwa alasan pemilihan materi pendidikan perdamaian sangat berkontribusi untuk mempersiapkan dan memperlengkapi peserta sekolah perempuan melakukan pembangunan perdamaian relasional. Sebab memperhitungkan konteks yaitu masyarakat pasca konflik, mendasari konten pada konteks yaitu mengarah pada membangun hubungan, dan memperhitungkan metode sesuai konteks dan konten yang menekankan pembelajaran pengalaman dan integrasi pengetahuan dan praktek,

suatu strategi tepat yang mengarah pada terbangunnya perdamaian relasional melalui komponen interaksi perilaku, sikap subjektif terhadap yang lain dan gagasan hubungan. Pilihan pada materi dan metode ini berkontribusi pada kemampuan peserta untuk melakukan pembangunan perdamaian relasional.

Kesimpulan

Kajian ini memperlihatkan bahwa Pembangunan perdamaian relasional dapat tercapai di Kabupaten Poso melalui kontribusi dari kegiatan pendidikan perdamaian. Pendidikan Perdamaian yang dilaksanakan di Sekolah Perempuan melalui tujuan pelaksanaannya, proses interaksi di antara peserta dan model pendidikan perdamaian "ramah" perempuan, menunjukkan proses yang terjadi di sekolah tersebut memberi kontribusi yang sesuai untuk pembangunan perdamaian relasional. Pendidikan Perdamaian di sekolah perempuan menjadi wadah untuk sosialisasi pembentukan karakter dan proses transformasi di tengah masyarakat pasca konflik. Pendidikan perdamaian di Sekolah Perempuan memperlihatkan peran yang signifikan untuk pemeliharaan sistem, dan penguatan struktur sehingga masyarakat peduli dengan pelestarian perdamaian. Kegiatan pendidikan perdamaian sangat jelas terlihat membangun suatu kondisi yang dapat mendorong terbangunnya perdamaian relasional. Perdamaian relasional menjadi keadaan ideal bagi masyarakat pasca konflik di Poso karena membuka ruang pada terbangunnya hubungan terbuka, setara dan membangun persahabatan diantara aktor yang pernah berseteru. Jika Pendidikan perdamaian merupakan bagian dari upaya membangun 'infrastruktur untuk perdamaian' menuju pada perdamaian relasional hal itu menunjukkan orientasi membangun hubungan yang membentuk pola, proses, dan struktur baru di Kabupaten Poso, sehingga budaya damai dan pencegahan konflik dapat terjadi dalam jangka waktu yang panjang.

Daftar Pustaka

Buku

- Hasrullah, (2009). *Dendam Konflik Poso (periode 1998-2001) Konflik Poso dari Perspektif Komunikasi Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Galtung,J. (Norway) (1974). *On Peace Education dalam Wulf, Christoph [Hrsg.] Handbook on Peace Education*. Frankfurt am Main; Oslo : International Peace Research Association, Education Committee 1974, XI, 378 S.
- Galtung,J, (1976) *Three approaches to Peace: Peacekeeping, peacemaking, peacebuilding*. Impact of science society, PRIO Publication,.
- Galtung,J (1996) *Peace by Peaceful means, Peace and conflict, development and Civilization*. Oslo : International Peace Research Institute.
- Klinken Van,G. (2007) *Communal Violence and Democratization in Indonesia*. New York : Routledge
- MacRae,D. (2013) *A Few Poorly Organised Men : Interreligious Violence in Poso, Indonesia*. Leiden : Koninklijke Brili NV
- McKay, S. (2002). Gender and Post-Conflict Reconstruction. In HW Jeong, *Approaches to Peacebuilding* (pp. 123-146). New York: Palgrave Macmillan.

- Navvaro,C., Galace,J.N., (2019) *Peace Education: A Pathway to a Culture of Peace Third Edition*, Philippines : Center for Peace Education
- Rozi, Syafuan (dkk) 2006 . *Kekerasan Komunal: Anatomi Resolusi Konflik di Indonesia*. (Placeholder1) Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Jakarta : Pusat Penelitian Politik -LIPI
- Ruagadi,E.S., Waru,D., Lempadely, S.V.E., Agus,S.A., *Bersatu Kita Teguh di Tana Poso, dalam Amirrachman, Alpha (ed) (2007) Revitalisasi Kearifan Lokal (Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*. Jakarta : ICIP
- Standish, K. (2015) *Cultural Violence and Gender Peacebuilding via Peace Education dalam Gender and Peacebuilding All Hands Required* Edited by Maureen P. Flaherty, Thomas G. Matyók, Sean Byrne, and Hamdesa Tusso. Maryland : Lexington Books

Jurnal/Proceeding Online

- Adjei, M. (2019) Women's participation in peace processes: a review of literature. *JOURNAL OF PEACE EDUCATION* <https://doi.org/10.1080/17400201.2019.1576515>.
- Almagro, M.M. (2018). Hybrid Clubs: A Feminist Approach to Peacebuilding in the Democratic Republic of Congo, *Journal of Intervention and Statebuilding*, DOI: 10.1080/17502977.2018.148212
- Anam, S. (2018). Peacebuilding: the Shift towards a Hybrid Peace Approach. *Global & Strategis*, Th. 9, No. 1
- Astuti Dewi, M. (2013) *Membangun Perdamaian dari Perspektif Perempuan*. Proceeding Konferensi Nasional II Media, Bisnis dan Perdamaian FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta 13 November 2013
- Brigg, Morgan (2018), Relational and Essential: Theorising Difference for Peacebuilding. *Journal of Intervention and Statebuilding Volume 12, 2018 - Issue 3: Peacebuilding and the Politics of Difference* Pages 352-366
- Ellison,C.S. (2012) *The Role of Education in Peacebuilding : An analysis of five change in Sierra Leone*. Compare 2012 1 -22 British Association for International and Comparative Education <http://dx.doi.org/10.1080/03057925.2012.734138> <http://www.tandfonline.com>
- Galtung,J. (1969) . Violence, Peace, and Peace Research *International Peace Research Institute*, Oslo, 1967. Violence, Peace, and Peace Research. Source: Journal of Peace Research, Vol. 6, No. 3 (1969), pp. 167-191
- Guetta,S. (2013) *From peace education to culture of peace: context and issues*. Studi sulla formazione, 1-2013, pag. 167-179 ISSN 2036-6981 (online) © Firenze University Press
- Haavelsruud,M., Stenberg, (2012). *Analyzing peace pedagogies Journal of Peace Education* Vol. 9, No. 1, April 2012, 65–80
- Harris,I.M. (2004) *Peace Education Theory*. *Journal of Peace Education* Vol 1, No.1
- Jarstad,A.K., Eklund,N., Johansson,P., Olivius,E., Saati,A., Sahovic,Dz., ... , Akebo,M., (2109). *Three Approaches To Peace: A Framework for Describing and Exploring Varieties of Peace*. Umeå Working Papers in Peace and Conflict Studies, no 12 <https://www.researchgate.net/publication/338037408>

- Kristimanta, P.A (2018) *Grassroots Post-conflict Peace building : A Case Study of Mosintuwu Women School in Poso Regency, Central Sulawesi*. Conference paper Indonesian Institute of Science <https://www.researchgate.net/publication/329771201> Nutfa, M dan Anwar, S, (2015). *Membangun kembali perdamaian, Rekonsiliasi konflik komunal berbasis trust*, Kritis, Jurnal Sosial Ilmu Politik UNHAS (journal.unhas.ac.id).
- Sukendar, 2011. *Pendidikan damai bagi Anak-anak korban konflik*, , Jurnal walisongo, Vol 19 nomor 2 (journal.walisongo.ac.id).
- Synott, J. (2005), *Peace education as an educational paradigm: review of a changing field using an old measure*. Journal of Peace Education Vol. 2, No. 1, March, pp. 3–16.
- Trijono, Lambang (2009) *Pembangunan Perdamaian Pasca Konflik di Indonesia: Kaitan Perdamaian, Pembangunan dan Demokrasi dalam Pengembangan Kelembagaan Pasca Konflik*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 13. No. 1. Juli 2009 (48–70).
- Manna.Z., Syafiie, I.K (2014) *Strategi Pemerintah daerah Poso periode 2010-2015 dalam menghadapi konflik sosial*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 2 Juni 2014.
- Nutfa, Moh. dkk. (2016), *Kegagalan Rekonsiliasi Masyarakat Poso Pasca Konflik Komunal*. Jurnal Analisis, Desember Vol. 5 No.2: 168 – 174. <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/21056899ae6826cee8bec39f8896c54a.pdf>
- Page, J (2004). *Peace Education : Exploring some Philosophical Foundations*. International Review of Education
- Pulubuhu, D.A.T., Ramli, M.A.T, Yani, A.A., Arsyad, M., Hans, A., Halwathiah, S. (2019). *Social Trust of Indonesia's Post Conflict Society: A Case Study of Poso Regency*. Proceedings of the 1st Hasanuddin International Conference on Social and Political Sciences, HICOSPOS 2019, 21-22 October 2019, Makassar, Indonesia <https://eudl.eu/proceedings/HICOSPOS/2019>
- Purnasanti, Linda Uji.(2018) *Efektivitas Peran Search for Common Ground dalam menangani Kejahatan kemanusiaan terhadap Perempuan dan anak- anak korban konflik Poso*. 2009-2016, Journal of International Relation, Volume 4, No 1, 2018, hal 9 – 21
- Sempiga, O. (2017) *Peacekeeping, peacemaking, and peacebuilding: Towards positive peace in a society that endured conflict*. WEIS (World Environment and Island Studies) Vo,7 No.4 December 30, 2017
- Soderstorm, J., Akebo, M., Jarstad, A.K. (2020) *Friends, Fellows and Foes: A New Framework for studying Relational Peace*. International Studies Review (2020) 0, 1–25 ANALYTICAL ESSAY
- Tacoh, Y.T.B. (2017) *Model pendidikan perdamaian “Ramah Perempuan” pada Sekolah Perempuan untuk Perdamaian*. Pax Humana Jurnal Ilmiah Humaniora Yayasan Bina Darma. <https://www.jurnalilmiah-paxhumana.org/index.php/PH/article/view/123>
- Wibisono, S. (2013) *Pendekatan Pendidikan Perdamaian dalam Kerangka Peace Building*. Proceeding Konferensi Nasional II Media, Bisnis dan Perdamaian FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta 13 November 2013

- Wijaya,N. (2020) *Resolusi Konflik Berbasis Budaya oleh Masyarakat Kabupaten Poso*.
<http://journal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/27048>
- Yakobus, I.K., Kasnawi,T, Agustang, A., Abdul Gani, H.A. (2019). *Hybridization of the Poso Conflict Resolution Discourse Indonesia*. IOSR Journal Of Humanities And Social Science Volume 24, Issue 5, Ser. 10 (May. 2019) 01-09

Thesis dan Disertasi

- Indriani,J.A. (2018) *Pendidikan Perdamaian untuk Perempuan (Studi Kasus Sekolah Perempuan untuk Perdamaian Jakarta Timur dan Poso*. Tesis Program Pasca Sarjana, Prodi Ketahanan Nasional, Universitas Gajah Mada
- Shulika, L.S. (2018). *Building Peace in post-conflict societies: An Exploration of the role of women in Liberia's Peacebuilding Architecture*. Dissertasi University of Kwazulu-Natal, South Africa.

Working Paper

- Bretherton.D., Weston,J., Zbar,Vic., (2003). *Peace Education Curriculum development in post-conflict contexts : Sierra Leone* June 2003 Prospects 33(2):219-230
<https://search.informit.org/doi/abs/10.3316/aeipt.127762>
- Chadwick,W . Debiel, T. Gadinger, F (eds.). (2013) *Relational Sensibility and the 'Turn to the Local': Prospects for the Future of Peacebuilding* (Global Dialogues 2). Centre or Global Cooperation Research Duisburg: Käte Hamburger Kolleg /
- Hagglund,S. (2004) *Comment: Contribution of Psychology to Peace Education*. Paper Presentation orriginally presented at the 8th International Symposium on the Contribution of Psychology to Peace, Sunne, Sweden, 23–29 June 2003.
- Jarstad,A.K., Eklund,N., Johansson,P, Olivius,E., Saati,A., Sahovic,Dz., ... , Akebo,M., (2109).*Three Approaches To Peace: A Framework for Describing and Exploring Varieties of Peace*. Umeå Working Papers in Peace and Conflict Studies, no 12
<https://www.researchgate.net/publication/338037408>
- Kapur, R. (2018) *The Role of Education in Peace Building*.
https://www.researchgate.net/publication/323825341_The_Role_of_Education_in_Peace_Building
- Sherwood, L. (2016) *Women, Peace and Security: Gender Perspectives on Conflict Prevention and Peacebuilding*. TRENDS WORKING PAPER 06 TRENDS. Research & Advisory.
- Sorensen,B. (1998). *Women and Post-Conflict Reconstruction: Issues and Sources*. WSP Occasional Paper No. 3, June 1998 United Nations Research Institute for Social Development Programme for Strategic and International Security Studies.
- UNICEF, (2011). *The Role of Education in Peacebuilding: Literature Review*, New York.

Pdt Yuliana Tien B. Tacoh, SPAK, MPd, Staff Pengajar di Progd Pendidikan Teknik Informasi dan Komputer, Fak Teknologi Informasi,UKSW, sejak Oktober 2015. Email: yulianatacoh@gmail.com